

**PERAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH DALAM MENJALANKAN
TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KASUS
PENGHENTIAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (PHK) BAGI
KARYAWAN PT TIMAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus PT Timah Tbk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
ABI PRADUA
Nim : 4011.211.001
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUN IJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABI PRADUA

Nim : 4011.211.001

Jurusan : IlmuHukum

Fakultas : Hukum

JudulSkripsi :

Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas (Studi Kasus PT Timah Tbk)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan,


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH
ABI PRADUA
NIM. 4011.211.001

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan Penelitian

**PERAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH DALAM MENJALANKAN
TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KASUS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (PHK) BAGI
KARYAWAN PT TIMAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus PT Timah Tbk)**

Oleh :

Abi Pradua

NIM: 4011.211.101

Konsentrasi :Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M)
NP.105206003

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H., M.H)
NIP.198402102012121005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH DALAM MENJALANKAN
TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KASUS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (PHK) BAGI
KARYAWAN PT TIMAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus PT Timah Tbk)**

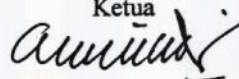
SKRIPSI

Oleh:
ABI PRADUA
NIM: 4011.211.001
Konsentrasi: Keperdataan

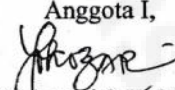
Telah di Pertahankan di Depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 11-01-2017
Dan Dinyatakan

Majelis Penguji

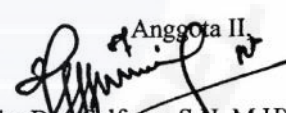
Ketua


(A.Fauzi Amiruddin, S.H., M.M)


Anggota I,


(Yokotani, S.H., M.H)
NP.606206003

Anggota II,


(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H)
NIP.198504122014041002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


Syamsul Hadi, S.H., M.H

NP.606007014

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

**Ku persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa
bersyukur dan berterima kasih untuk :**

- Untuk kedua orang tua saya Martono dan Sawiyah yang telah menyayangi, mendidik, dan mendampingi saya hingga saya bisa mencapai semua harapan saya
- Untuk kedua kakak adik saya, Meiza Utama dan Agustia Pratiwi dan buat kekasih hati saya Putri Novita Sari yang telah mendukung saya
- Untuk kakek saya, Alm H. Salim, Nenek saya Hatijah
- Untuk segenap sahabat saya, yang telah mendukung saya dan telah melewati waktu perjalanan bersama saya
- Dan terima kasih untuk Almamater tercinta Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan saya banyak kenangan indah selama masa-masa kuliah

MOTTO

**Jadilah pribadi yang sabar dan tawakal adalah kunci satu satunya
menghadapi ujian dan cobaan**

Abstrak

AbiPradua

Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan
Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan

(PHK) Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas

Skripsi. Fakultas Hukum. 2017

Kata kunci: Peran Dewan Komisaris, Tugas Pengawasan, Pemutusan Hubungan
Ketenagakerjaan (PHK)

Tugas pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris menjadikan segala pelaksanaan pengawasannya diberikantindakan yang dapat dijalankan berdasarkan Aturan Dasar dari perusahaan yang membentuknya dengan mengacu pada ketentuan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan juga tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan yang hendak diangkat yaitu, bagaimana peran Dewan Komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagi karyawan PT Timah dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagi karyawan PT Timah Tbk. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus PHK dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) PT Timah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat yuridisempiris dengan analisis data yang dilakukan cara deskriptif kualitatif. Bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari tugas pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan setiap tahunnya dengan muatan pelaporan dari keseluruhan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhitung 1 (satu) tahun terakhir.

Abstract

AbiPradua

The Role of Board of PT Timah in Running Sepervision Againts the case of Termination of Employment Relationship for Employees of PT Timah Reviewed in the law Number 40 Of 2007 concerning Limited Liability companies

Essay. Faculty of Law. 2017

Keywords: Role of the Board of Commissioner, Supervisory, Cessation of Employment Relations (PHK)

Board of Commissioner Role in a company has the functions and tasks directly regulated by legislation. Either national legislation or the internal rules of the company itself. Board of Commissioner Supervision implementation must be based on the company basic rules, which refer to the above regulation i.e. Act No. 40 of 2007 On Limited Company. Cessation of Employment Relations (PHK) for troubled employees also subject to Board of Commissioner Supervision. By providing input and advice to the other company organs such as Board of Directors related to worker layoffs. The issues covered are how the PT Timah Board of Commissioner Role in supervising Cessation of Employment Relations (PHK) to PT Timah employee is dan what form of PT Timah Board of Commissioner Responsibility in the General Meeting of Shareholders (RUPS) in supervising Cessation of Employment Relations (PHK) to PT TimahTbk. employee is. The purpose of this research is to determine PT Timah Board of Commissioner Role in supervising Cessation of Employment Relations (PHK) to PT Timah employee and find out form of PT Timah Board of Commissioner Responsibility in the General Meeting of Shareholders (RUPS) in supervising Board of Director on Cessation of Employment Relations (PHK) to PT Timah employee. The method used in this research is the juridical empirical legal research methods with the descriptive qualitative data analysis. Form of PT Timah Board of Commissioner Responsibility in the General Meeting of Shareholders (RUPS) is by reporting annually, holding a meeting attended by all of company organs with overall supervisory activities carried out by the Board of Commissioner report in last (1) one year.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kebaikan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul

Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Penghentian Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) Bagi Karyawan PT Timah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Timah Tbk)

Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian di Jurusan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Dimulai dari perjalanan panjang, yakni mengikut ipendidikan, mengadakan penelitian, kemudian sampai kepada penulisan skripsi ini, semuanya itu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. BapakDr.Ir. Muh. Yusuf M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Pembimbing Utama yang dalam kesibukan nya, beliau tetap bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penuh ketekunan dan kesabaran serta mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Pembimbing Pendamping yang dalam kesibukannya, beliau tetap bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penuh ketekunan dan kesabaran serta mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. BapakWirazilmustaan,S.H, M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Para Dosen dan Staf pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang dengan perantaranya penulis mendapat ilmu yang bermanfaat.
7. AlmamaterkuUniversitas Bangka Belitung.

Akhirnya saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Balunujuk, 6 Januari 2017

Penulis

Abi pradua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TEORI-TEORI PERUSAHAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL... 22	
A. TEORI-TEORI TENTANG PERUSAHAAN	22
1. Teori Organ Perusahaan	22
2. Teori Kewenangan	24
3. Teori Pengawasan	25
B. HUKUM PERUSAHAAN.....	26
1. Pengertian Perusahaan	26

2. Jenis-jenis Perusahaan.....	29
3. Rapat Umum Pemegang Perusahaan	30
4. Dewan Direksi.....	32
5. Dewan Komisaris.....	35
C. HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	46
1. Pengertian Pemberhentian Hubungan kerja(PHK)	47
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubunga Kerja(PHK)	48
3. Dasar Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK)	50
 BAB III PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KASUS PENGHENTIAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (PHK) BAGI KARYAWAN PT TIMAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAAN TERBATAS	
	57
A. Peran Dewan Komisaris PT Timah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Kasus Penghentian Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) Bgai Karyawan PT Timah.....	57
B. Bentuk Pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah Tbk Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Terhadap Dewan Dereksi Terhadap Kasus Pemberhentiaan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) Bagi Karyawan PT Timah Tbk.....	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

